

PENERAPAN MANAJEMEN SARANA PRASARANA SEBAGAI UPAYA MENCAPAI STANDAR SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI SMA KANJENG SEPUH (SMAKS) SEDAYU GRESIK

Khoirul Hakim¹, Suyanto², M.Furqon Wahyudi³
^{1,2,3} Universitas Gresik, Indonesia

Email: makkunasri@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v11i1.1623>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 January 2026
Final Revised: 24 January 2026
Accepted: 10 February 2026
Published: 24 February 2026

Keywords:

Facilities And Infrastructure Management
Educational Facilities Standards
Educational Management
Case Study



ABSTRAK

This study aims to describe and analyze the implementation of educational facilities and infrastructure management in achieving educational facilities and infrastructure standards at Kanjeng Sepuh Senior High School, Sedayu Gresik. A qualitative case study approach was employed. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and documentation involving school leadership, facilities and infrastructure managers, and teachers. Qualitative data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing with triangulation to ensure trustworthiness. The results show that management functions covering planning, procurement, maintenance, and evaluation have been implemented systematically and participatively. The achievement of educational facilities and infrastructure standards is classified as good in terms of the availability of core learning facilities, maintenance of the learning environment, and classroom capacity ratios, but remains suboptimal in the provision of inclusive facilities and the development of digital learning infrastructure. Supporting factors include strong managerial leadership, internal and external collaboration, and the utilization of endowment-based funding as an alternative financial source, while limited budgets remain the primary constraint.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Kanjeng Sepuh Sedayu Gresik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap unsur pimpinan sekolah, pengelola sarana dan prasarana, serta guru. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi manajemen sarana dan prasarana yang meliputi perencanaan, pengadaan dan evaluasi telah dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif. Capaian standar sarana dan prasarana pendidikan tergolong baik pada aspek ketersediaan fasilitas pembelajaran utama, pemeliharaan lingkungan belajar, dan rasio ruang kelas, namun belum optimal pada pemenuhan fasilitas inklusif dan pengembangan teknologi pembelajaran. Faktor pendukung utama meliputi kepemimpinan manajerial kepala sekolah, kolaborasi internal dan eksternal, serta pemanfaatan wakaf sebagai sumber pendanaan alternatif, sedangkan keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama.

Kata kunci: Manajemen Sarana Prasarana, Standar Sarana Prasarana Pendidikan, Manajemen Pendidikan, Studi Kasus

PENDAHULUAN

Kepala sekolah memegang peran strategis dalam ekosistem pendidikan sebagai pemimpin yang mengarahkan sekolah menuju pencapaian mutu pendidikan yang optimal. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek pedagogis, tetapi juga mencakup tanggung jawab manajerial, salah satunya dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif dan efisien merupakan fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, serta mampu mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Terry (dalam Wahyosumidjo, 2011) menegaskan bahwa manajemen yang baik merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan secara optimal.

Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta perangkat teknologi digital, memiliki kontribusi signifikan terhadap efektivitas proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, dan bertanggung jawab (Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003). Dengan demikian, ketersediaan dan kualitas sarana prasarana bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan instrumen strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Komitmen terhadap peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah ditegaskan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Regulasi ini menekankan bahwa kepala sekolah wajib memiliki kompetensi manajerial, termasuk kemampuan mengelola sumber daya sekolah, khususnya sarana dan prasarana, secara profesional dan berkelanjutan (Kemendikdasmen, 2025). Tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan bahwa kepemimpinan kepala sekolah berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa secara nasional hanya sekitar 65% dari ±14.500 SMA negeri dan swasta yang memiliki ruang kelas dalam kondisi baik. Akses terhadap laboratorium yang lengkap baru mencapai sekitar 55%, dengan angka yang lebih rendah di wilayah pedesaan, termasuk Provinsi Jawa Timur yang hanya mencapai 48%. Di Kabupaten Gresik, sekitar 70% SMA memenuhi standar minimal sarana prasarana, namun capaian ini masih dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran serta dampak berkepanjangan pandemi COVID-19 (Kemendikbudristek, 2024).

Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan juga harus diselaraskan dengan kebijakan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Regulasi ini menetapkan delapan standar pendidikan nasional, di mana standar sarana dan prasarana menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembelajaran yang efektif dan bermutu (Sekretariat Negara, 2022). Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 memperbarui kriteria minimum sarana

prasarana dengan persyaratan yang lebih ketat, antara lain rasio maksimal 1:32 siswa per ruang kelas, ketersediaan laboratorium lengkap, perpustakaan dengan minimal 1.000 judul buku, rasio perangkat digital minimal 1:10 siswa, serta penyediaan fasilitas inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus (Kemendikbudristek, 2023). Pemenuhan standar ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) yang saat ini baru mencapai sekitar 85% secara nasional, masih di bawah target ideal sebesar 95%.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan sarana dan prasarana di SMA Kanjeng Sepuh (SMAKS) Sedayu Gresik menjadi kajian yang relevan dan strategis. SMAKS merupakan sekolah menengah atas swasta berbasis yayasan yang berlokasi di wilayah pedesaan Kabupaten Gresik. Berdasarkan data akreditasi tahun 2022, sekolah ini memperoleh peringkat A dengan nilai 94% pada standar sarana dan prasarana. Namun demikian, capaian tersebut masih mengacu pada regulasi lama, seperti Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 dan peraturan turunannya. Pasca diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023, ditemukan adanya kesenjangan antara kondisi aktual sarana prasarana sekolah dengan standar terbaru yang ditetapkan.

Hasil observasi awal, wawancara dengan kepala sekolah dan guru, serta telaah dokumen profil sekolah tahun 2024 menunjukkan bahwa SMAKS masih menghadapi keterbatasan signifikan, terutama pada aspek digitalisasi dan fasilitas inklusif. Sekolah hanya memiliki sekitar 20 unit komputer untuk melayani 292 siswa, serta belum dilengkapi dengan fasilitas ramah difabel secara memadai (SMA Kanjeng Sepuh, 2025); (Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025). Kondisi ini mencerminkan tantangan umum yang dihadapi sekolah swasta di wilayah pedesaan, yang sangat bergantung pada dana BOS, hibah, dan kontribusi komite sekolah, yang sering kali belum mampu menutup kesenjangan dengan Standar Nasional Pendidikan.

Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 sebagai regulasi terbaru menekankan aspek digitalisasi pembelajaran, inklusivitas, serta penciptaan lingkungan belajar yang sehat dan berkelanjutan. Hingga saat ini, penelitian yang secara spesifik menjadikan regulasi ini sebagai acuan utama dalam menganalisis manajemen sarana dan prasarana sekolah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang tinggi serta memberikan kontribusi aktual terhadap implementasi kebijakan pendidikan nasional yang mutakhir.

Selain itu, pemilihan SMAKS Sedayu Gresik sebagai lokasi penelitian memiliki nilai strategis karena merepresentasikan kondisi ribuan SMA swasta pedesaan di Indonesia yang memiliki akreditasi baik, tetapi belum sepenuhnya memenuhi standar terbaru akibat keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan memiliki daya generalisasi yang kuat serta mampu memberikan rekomendasi model manajemen sarana dan prasarana yang realistis, adaptif, dan dapat direplikasi oleh sekolah-sekolah sejenis.

Berbagai penelitian mutakhir menegaskan bahwa manajemen sarana dan prasarana yang efektif tidak hanya berorientasi pada pengadaan fasilitas fisik, tetapi juga pada perencanaan berbasis kebutuhan, pemanfaatan berkelanjutan, integrasi teknologi pembelajaran, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan secara

kolaboratif (Arifin & Setiawan, 2021);(Sutrisno & Anwar 2022);(Leithwood et al., 2020). Kepemimpinan kepala sekolah berperan penting dalam mengoptimalkan seluruh proses tersebut melalui pendekatan manajemen berbasis sekolah yang adaptif terhadap keterbatasan sumber daya(Bush & Glover, 2016); (Hidayati & Rohmah, 2019).

Sejalan dengan itu, Mulyasa (2021) serta Kemendikbudristek (2024) menekankan bahwa manajemen sarana dan prasarana yang efektif hendaknya menerapkan pendekatan sistematis seperti siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) atau Total Quality Management (TQM) agar pemenuhan standar dapat dilakukan secara berkelanjutan. Yogaswara dan Sa'ud (2010) juga menegaskan bahwa kemampuan manajerial kepala sekolah tercermin dalam perencanaan, koordinasi, dan evaluasi program yang berdampak langsung pada peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, manajemen sarana dan prasarana memiliki potensi strategis sebagai instrumen utama dalam mencapai standar sarana dan prasarana pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam Penerapan Manajemen Sarana dan Prasarana sebagai Upaya Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA Kanjeng Sepuh Sedayu Gresik, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan manajemen pendidikan di sekolah menengah, khususnya pada konteks sekolah swasta pedesaan.

METODE PENELITIAN

Secara garis besar penelitian ini mendeskripsikan bagaimana penerapan manajemen sarana dan prasarana sebagai upaya mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMAKS Sedayu Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam penerapan manajemen sarana prasarana sebagai upaya memenuhi standar sarana prasarana pendidikan (SNP), yang tidak dapat diukur hanya melalui angka, tetapi memerlukan pemaknaan terhadap proses, kebijakan, dan praktik manajerial yang terjadi di lapangan (Creswell, 2014). Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena secara holistik dan kontekstual pada satuan pendidikan tertentu sebagai satu kesatuan sistem (Yin, 2018).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diuraikan secara deskriptif (Bogdan & Biklen 1982). Penelitian kualitatif berfokus pada konteks alami sebagai keseluruhan, menggunakan manusia sebagai instrumen penelitian, melakukan analisis data dengan pendekatan induktif, bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dari bawah, dan bersifat deskriptif yang lebih menekankan pada proses daripada hasil.

Penelitian ini dilaksanakan di SMAKS Sedayu, yang terletak di Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan fokus penelitian. Salah satu alasan utama adalah adanya upaya yang berkelanjutan dari pihak sekolah dalam meningkatkan dan mengembangkan sarana serta prasarana pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi lembaga dalam menjaga serta meningkatkan mutu pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Sebagai informan kunci, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana serta guru. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan, kewenangan, dan pemahaman mereka terhadap manajemen sarana prasarana pendidikan (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal, yang bertujuan untuk memberikan deskripsi rinci dan mendalam mengenai suatu latar, objek, atau peristiwa tertentu. Studi kasus merupakan jenis penelitian yang berfokus pada kajian intensif terhadap unit sosial tertentu, dalam hal ini lembaga pendidikan SMAKS Sedayu Gresik. Sebagai penelitian studi kasus, langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data di situs penelitian, yaitu SMAKS Sedayu Gresik, dengan penggalian data secara mendalam untuk mengetahui penerapan manajemen sarana dan prasarana, khususnya proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, serta pencapaian standar sesuai Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023.
2. Menemukan hal-hal yang menarik tentang cara kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, tim sarpras, dan guru dalam mengelola sarana dan prasarana untuk mendukung proses pembelajaran.
3. Menganalisis penerapan manajemen sarana dan prasarana di SMAKS Sedayu Gresik dengan merefleksikan kegiatan pengelolaan yang telah dilakukan.
4. Mengembangkan pemahaman tentang faktor pendukung dan penghambat serta model manajemen yang tepat untuk mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.
5. Membuat suatu kesimpulan, implikasi, saran, dan masukan dalam menerapkan manajemen sarana dan prasarana di SMAKS Sedayu Gresik dari unsur kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan komite sekolah.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipatif pasif, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, tim sarpras, serta guru di lokasi penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan informan tentang tempat dan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara, selanjutnya peneliti menggali data dengan mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu penerapan manajemen sarana dan prasarana untuk mencapai standar pendidikan di SMAKS Sedayu Gresik, untuk mengetahui objek secara langsung. Metode observasi juga digunakan untuk memperoleh data lengkap mengenai kondisi di lapangan.

Teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dokumentasi. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang diminta pada kepala sekolah berupa profil sekolah, data inventaris sarana prasarana, laporan akreditasi, rencana kerja tahunan sekolah (RKTS), rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS), catatan pemeliharaan aset, serta foto dan arsip terkait pengelolaan sarana prasarana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian penerapan manajemen sarana dan prasarana pendidikan sebagai upaya memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Perencanaan sebagai Upaya Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Penelitian ini mengkaji praktik manajemen perencanaan sarana dan prasarana pendidikan di SMAKS Sedayu, Kabupaten Gresik, sebagai upaya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) diperoleh melalui triangulasi metode kualitatif, meliputi wawancara mendalam dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, dan guru; observasi partisipan; serta analisis dokumen seperti kartu inventaris, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), dan notulen rapat.

Proses perencanaan bersifat sistematis dan berbasis data, dimulai dari evaluasi periodik fasilitas existing melalui peninjauan langsung dan pencatatan kerusakan. Pendekatan ini proaktif, mencocokkan kebutuhan sekolah dengan regulasi nasional, termasuk petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Karakteristik utama adalah kolaborasi inklusif melalui rapat multipihak yang melibatkan kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan komite sekolah, serta penggunaan angket partisipatif yang mencakup perspektif siswa. Rapat dijadwalkan secara strategis pada periode transisi tahun ajaran, dengan penentuan prioritas berfokus pada fasilitas yang berdampak langsung terhadap proses belajar-mengajar, seperti ruang kelas, laboratorium, dan perangkat teknologi pendukung.

Pengelolaan anggaran dilakukan secara realistis dengan mengandalkan dana BOS dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), dilengkapi sumber alternatif dari komite sekolah serta kerja sama eksternal. Kepatuhan terhadap regulasi nasional tinggi, didukung oleh struktur tim yang jelas di bawah koordinasi wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana.

Temuan menunjukkan kemajuan signifikan dalam pencapaian SNP, tercermin pada peningkatan kualitas lingkungan belajar dan efektivitas pembelajaran. Meskipun demikian, keterbatasan anggaran dan kurangnya integrasi teknologi digital untuk monitoring menjadi tantangan utama. Model manajemen ini merepresentasikan praktik baik yang akuntabel dan inklusif, berpotensi direplikasi pada satuan pendidikan lain dengan sumber daya terbatas guna optimalisasi pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan.

2. Penerapan Manajemen Pengadaan Sarana dan Prasarana sebagai Upaya Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Data dikumpulkan melalui triangulasi metode kualitatif, yaitu wawancara mendalam dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, dan guru; observasi partisipan; serta analisis dokumen (surat pesanan, berita acara penerimaan barang, kartu inventaris, dan laporan penggunaan dana BOS).

Proses pengadaan bersifat sistematis dan akuntabel, dimulai dari pengajuan kebutuhan oleh guru, verifikasi oleh tim sarana prasarana, persetujuan dalam RKAS, hingga penerimaan dan pendokumentasian barang. Verifikasi melibatkan pengecekan fisik dan konsultasi spesifikasi teknis untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pembelajaran.

Pendekatan pengadaan fleksibel dengan memanfaatkan beragam metode: pembelian langsung (menggunakan dana BOS dan kontribusi komite sekolah), hibah dari pihak eksternal (Lembaga Wakaf Kanjeng Sepuh dan alumni), perbaikan fasilitas existing, serta pembuatan mandiri untuk barang sederhana. Metode ini mencerminkan prinsip efisiensi anggaran dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Barang dikelompokkan berdasarkan kategori (alat ajar, mebel, teknologi informasi dan komunikasi) untuk memudahkan inventarisasi dan pelacakan. Koordinasi antarpihak dilakukan secara intensif melalui rapat dan grup WhatsApp, dengan melibatkan guru dalam verifikasi spesifikasi dan penerimaan barang.

Kepatuhan terhadap regulasi tinggi, tercermin pada dokumentasi lengkap sesuai Juknis BOS, termasuk riwayat negosiasi, berita acara, dan laporan keuangan. Pemilihan penyedia mengutamakan penunjukan langsung untuk skala kecil, dengan memprioritaskan penyedia lokal berdasarkan harga, kualitas, dan reputasi.

Pengelolaan dilakukan oleh tim khusus dengan pembagian tugas jelas (wakil kepala sekolah sebagai koordinator, bendahara untuk aspek keuangan, dan guru untuk verifikasi teknis). Sebelum pengadaan baru, dilakukan evaluasi kelayakan barang lama untuk menentukan prioritas perbaikan atau penggantian, sehingga meminimalkan pemborosan dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Temuan menunjukkan capaian signifikan dalam optimalisasi sumber daya terbatas melalui kemitraan eksternal dan kreativitas lokal, menghasilkan sarana prasarana yang mendukung proses pembelajaran efektif. Keunikan model ini terletak pada kombinasi fleksibilitas metode, kolaborasi multipihak, dan integrasi komunitas eksternal, yang menjadikannya praktik baik yang akuntabel dan adaptif. Model ini berpotensi direplikasi pada satuan pendidikan lain dengan kondisi anggaran serupa untuk percepatan pemenuhan SNP.

3. Capaian Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan hasil triangulasi metode kualitatif yang meliputi wawancara mendalam dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, dan guru, observasi partisipan, serta telaah dokumen (laporan inventaris, data Dapodik, dan hasil evaluasi delapan Standar Nasional Pendidikan), SMAKS Sedayu Gresik menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap ketentuan regulatif. Kepatuhan tersebut diperkuat melalui sosialisasi berkelanjutan terhadap Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa sekolah memiliki pemahaman regulasi yang kuat, yang tercermin dari praktik sosialisasi rutin melalui rapat kerja dan presentasi terstruktur kepada guru, tenaga kependidikan, serta komite sekolah. Praktik ini memastikan keselarasan pengelolaan sarana dan prasarana dengan standar nasional, termasuk pemenuhan rasio ruang kelas dan fasilitas laboratorium. Dari aspek ketersediaan, sekolah telah menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran yang memadai, seperti 18 ruang kelas, laboratorium IPA (biologi, kimia, dan fisika), perpustakaan, serta ruang multimedia. Inventarisasi menunjukkan sebagian besar fasilitas berada dalam kondisi baik, meskipun beberapa peralatan memerlukan pembaruan untuk mengoptimalkan pembelajaran berbasis praktikum dan presentasi digital.

Kualitas fisik fasilitas relatif terjaga melalui penerapan pemeliharaan rutin dan jadwal kebersihan harian, sehingga ruang kelas bersih, ventilasi memadai, dan tidak ditemukan kerusakan signifikan. Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan perbaikan berskala besar, seperti penanganan kebocoran atap. Integrasi teknologi dalam pembelajaran telah berjalan melalui pemanfaatan ruang multimedia yang dilengkapi komputer, proyektor, dan jaringan Wi-Fi yang stabil, meskipun keterbatasan jumlah perangkat mengharuskan penggunaan secara bergiliran.

Dari aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan, sekolah telah menyediakan fasilitas UKS dengan perlengkapan P3K, alat pemadam api ringan (APAR) di area strategis, serta petugas yang memiliki kompetensi dasar keselamatan. Kondisi ini menciptakan rasa aman dalam pelaksanaan kegiatan sekolah, walaupun pelatihan evakuasi darurat masih perlu ditingkatkan. Selain itu, rasio sarana dengan jumlah siswa telah memenuhi standar nasional, yakni rata-rata 30 siswa per kelas dari total 292 siswa, sebagaimana tercatat dalam data Dapodik, sehingga memungkinkan perhatian pedagogis yang relatif optimal.

Di sisi lain, penelitian menemukan kelemahan signifikan pada aspek fasilitas inklusif. Ketidadaan ramp akses, toilet khusus, dan alat bantu bagi peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip pendidikan inklusif, meskipun guru telah berupaya melakukan penyesuaian metode pembelajaran. Aspek lingkungan belajar sehat juga menjadi keunggulan sekolah, yang ditunjukkan melalui ketersediaan kafe sehat, wastafel di koridor, serta area hijau yang terawat. Fasilitas pengembangan karakter, seperti musholla, lapangan olahraga, dan ruang karya siswa, turut mendukung pembentukan nilai religius, kerja sama, dan kreativitas melalui kegiatan yang terintegrasi dalam program sekolah.

Keterlibatan masyarakat dan kemitraan menjadi faktor strategis dalam penguatan sarana dan prasarana. Dukungan dari Lembaga Wakaf Kanjeng Sepuh dan komite sekolah dalam bentuk hibah peralatan dan pendanaan tambahan berkontribusi nyata terhadap peningkatan fasilitas, meskipun koordinasi lintas pihak terkadang memerlukan waktu yang relatif panjang. Proses pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara rutin oleh tim sarana prasarana melalui monitoring bulanan dan evaluasi tahunan berbasis delapan

Standar Nasional Pendidikan, yang menghasilkan refleksi capaian dan rekomendasi perbaikan berkelanjutan.

Faktor pendukung utama capaian ini meliputi: (1) keterlibatan aktif masyarakat, khususnya Perkumpulan Kanjeng Sepuh dan komite sekolah, yang memberikan hibah peralatan dan pendanaan tambahan di luar dana BOS; (2) kepemimpinan sekolah yang kuat dalam sosialisasi regulasi dan koordinasi tim sarana prasarana; (3) pendekatan pemeliharaan rutin dan monitoring berkala yang proaktif; serta (4) kolaborasi multipihak yang menciptakan rasa memiliki bersama terhadap fasilitas sekolah.

Faktor penghambat yang masih menjadi tantangan signifikan adalah: (1) keterbatasan anggaran operasional, sehingga ekspansi teknologi digital dan pemeliharaan berskala besar sering tertunda; (2) absennya fasilitas inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus (seperti ramp akses, toilet khusus, dan alat bantu), yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip inklusivitas; serta (3) ketergantungan pada dukungan eksternal yang bersifat tidak tetap, sehingga perencanaan jangka panjang rentan terhadap fluktuasi kontribusi.

Temuan ini mengindikasikan capaian substansial dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan holistik pada sekolah swasta dengan sumber daya terbatas, didukung kolaborasi komunitas yang kuat. Namun, aspek inklusivitas dan ketergantungan anggaran belum terpenuhi sepenuhnya.

4. Model Manajemen yang Tepat untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Penelitian ini mengidentifikasi model manajemen sarana dan prasarana yang diterapkan serta yang dianggap paling tepat untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) di SMAKS Sepuh Sidayu, Kabupaten Gresik.

Model manajemen yang saat ini diterapkan bersifat partisipatif dengan elemen kolaboratif yang kuat, melibatkan guru, staf, komite sekolah, dan yayasan. Proses ini berada pada fase transisi dari pendekatan manual menuju integrasi digital parsial, meskipun penggunaan teknologi masih terbatas. Budaya gotong royong dan dukungan wakaf produktif dari Perkumpulan Kanjeng Sepuh menjadi ciri khas yang membedakan sekolah ini.

Informan secara konsisten menyepakati bahwa model paling tepat adalah Manajemen Sarana Prasarana Kolaboratif berbasis Teknologi dan Wakaf pada Sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Model ini mengintegrasikan tiga elemen utama: (1) partisipasi multipihak dengan garis komando jelas; (2) transformasi digital untuk pendataan, pelaporan, dan monitoring; serta (3) pendanaan berkelanjutan melalui wakaf produktif sebagai keunggulan kontekstual sekolah.

Kekuatan model saat ini meliputi: kolaborasi tinggi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, budaya gotong royong yang mengakar, serta dukungan wakaf yang stabil sebagai sumber pendanaan alternatif. Kelemahan utama adalah ketergantungan pada proses manual, pendekatan reaktif terhadap kerusakan, dan rendahnya literasi serta adopsi digital.

Sebagai benchmark, informan merujuk MAN Insan Cendekia untuk praktik digitalisasi total dan Pondok Modern Gontor untuk pengelolaan wakaf

produktif yang efektif, dengan penekanan pada adaptasi sesuai skala dan konteks sekolah.

Faktor pendukung keberhasilan model partisipatif ini adalah keterlibatan aktif stakeholder (guru sebagai penyedia informasi lapangan, komite dan yayasan sebagai penyokong pendanaan) serta kepemimpinan yang terarah.

Faktor penghambat mencakup: rendahnya literasi digital (terutama pada guru senior), kebutuhan investasi awal untuk infrastruktur teknologi, resistensi terhadap perubahan dari pola manual, serta ketergantungan pada kontribusi eksternal yang bersifat fluktuatif.

Untuk monitoring dan evaluasi, direkomendasikan empat pilar: (1) audit sarana prasarana digital setiap semester dengan melibatkan auditor eksternal; (2) dashboard real-time untuk pemantauan kondisi fasilitas; (3) mekanisme pelaporan berjenjang; serta (4) Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti $\geq 95\%$ barang layak pakai, tidak adanya ruang kelas bocor, dan kesesuaian rasio buku serta alat praktik dengan regulasi.

Temuan ini mengindikasikan bahwa model manajemen Sarana Prasarana Kolaboratif Berbasis Teknologi dan Wakaf pada Sistem Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). merupakan pendekatan yang kontekstual dan berkelanjutan bagi sekolah berbasis yayasan dengan sumber daya terbatas. Keberhasilan implementasi bergantung pada penguatan struktur kelembagaan unit sarana prasarana, transformasi digital bertahap melalui pelatihan dan aplikasi berbiaya rendah, serta diversifikasi pendanaan. Model ini berpotensi menjadi praktik baik yang dapat direplikasi pada satuan pendidikan serupa untuk akselerasi pemenuhan SNP sarana dan prasarana.

B. Pembahasan

1. Manajemen Perencanaan Sarana Prasarana sebagai Upaya Mencapai Standar Sarana dan Prasarana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen perencanaan sarana dan prasarana di SMAKS Sedayu Gresik dilaksanakan secara sistematis dan berbasis data. Proses perencanaan diawali dengan evaluasi periodik kondisi fasilitas sekolah melalui kartu inventaris dan dokumentasi sarana prasarana, yang kemudian menjadi dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan prioritas. Tahapan ini diperkuat dengan keterlibatan multipihak, seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan yayasan, melalui rapat strategis serta pengumpulan aspirasi menggunakan angket partisipatif.

Penetapan skala prioritas perencanaan didasarkan pada tingkat urgensi dan dampaknya terhadap proses pembelajaran, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran secara realistis yang bersumber dari dana BOS, BPOPP, serta kontribusi eksternal. Seluruh perencanaan disusun dengan mengacu pada regulasi nasional terkait standar sarana dan prasarana pendidikan. Temuan ini selaras dengan fungsi *planning* dan *organizing* dalam teori manajemen Terry (2000), tahapan *Plan* dalam siklus PDCA, serta prinsip efisiensi dan kohesi pengelolaan sarana prasarana sebagaimana dikemukakan Bafadal (2014). Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam monitoring dan dokumentasi perencanaan masih terbatas, sehingga menjadi ruang pengembangan ke depan.

2. Manajemen Pengadaan Sarana Prasarana sebagai Upaya Mencapai Standar Sarana dan Prasarana

Manajemen pengadaan sarana dan prasarana di SMAKS Sedayu dilaksanakan secara terstruktur dan akuntabel. Proses pengadaan diawali dengan verifikasi kebutuhan berdasarkan hasil perencanaan, diikuti penyusunan dokumentasi administratif yang lengkap. Sekolah menerapkan metode pengadaan yang fleksibel, meliputi pembelian langsung, penerimaan hibah, perbaikan fasilitas yang masih layak, serta pembuatan sarana secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kemampuan sekolah.

Pengelolaan pengadaan juga dilakukan melalui pengelompokan barang berdasarkan kategori dan fungsi, serta koordinasi intensif antar pihak yang terlibat. Komunikasi digital mulai dimanfaatkan meskipun belum sepenuhnya terintegrasi. Pemilihan penyedia dilakukan secara transparan untuk menjamin efisiensi dan kejelasan tanggung jawab. Praktik ini mencerminkan prinsip efisiensi pengelolaan sarana prasarana menurut Bafadal (2014), serta fungsi *organizing* dan *controlling* dalam manajemen Terry (2000), yang sejalan dengan tahapan *Do* dalam siklus PDCA.

Kekuatan kontekstual yang menonjol dalam pengadaan sarana prasarana di SMAKS Sedayu adalah adanya kemitraan eksternal, khususnya dengan yayasan wakaf dan alumni sekolah. Kolaborasi ini berperan penting dalam mengoptimalkan sumber daya yang terbatas dan mendukung pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pembelajaran secara bertahap.

3. Capaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Faktor Pendukung dan Penghambat.

Secara umum, SMAKS Sedayu Gresik telah menunjukkan capaian yang cukup substansial dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah memiliki fasilitas utama pembelajaran seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang multimedia, serta sarana pendukung kesehatan dan keselamatan. Rasio jumlah siswa per kelas telah memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan, dan pemeliharaan fasilitas dilakukan secara rutin untuk menjaga keberlanjutan fungsi sarana prasarana.

Integrasi teknologi pembelajaran dasar telah mulai diterapkan, meskipun masih dalam skala terbatas. Dukungan masyarakat, khususnya melalui hibah wakaf, menjadi faktor pendukung utama dalam pemenuhan dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah. Capaian ini mencerminkan penerapan fungsi *controlling* dan *evaluating* dalam manajemen Terry (2000), tahapan *Check* dan *Act* dalam siklus PDCA, serta prinsip kohesi pengelolaan sarana prasarana menurut Bafadal (Bafadal 2014a).

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat. Ketiadaan fasilitas inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta keterbatasan anggaran untuk pengembangan teknologi digital secara lebih luas menjadi kelemahan signifikan. Kondisi ini menghambat pemenuhan prinsip inklusivitas dalam Standar Nasional Pendidikan secara komprehensif dan berkelanjutan.

4. Model Manajemen yang tepat untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Berdasarkan sintesis antara temuan empiris dan kajian teori, model manajemen yang paling relevan untuk diterapkan di SMAKS Sedayu Gresik adalah **Manajemen Sarana dan Prasarana Kolaboratif Berbasis Teknologi dan Wakaf dalam Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**. Model ini mengintegrasikan kekuatan lokal berupa budaya kolaboratif dan wakaf produktif dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai upaya mengatasi kelemahan pengelolaan yang masih bersifat manual dan reaktif.

Model tersebut selaras dengan siklus PDCA, prinsip efisiensi dan kohezi Bafadal (2014), serta konsep MBS yang menekankan otonomi sekolah dan partisipasi aktif masyarakat. Praktik baik dari MAN Insan Cendekia dalam aspek digitalisasi dan Pondok Modern Gontor dalam pengelolaan wakaf menjadi referensi penguatan model ini secara kontekstual. Keberhasilan implementasi model sangat bergantung pada pembentukan unit sarana prasarana yang mandiri, pelaksanaan pelatihan literasi digital secara bertahap, serta diversifikasi sumber pendanaan sekolah.

Secara keseluruhan, manajemen sarana dan prasarana di SMAKS Sedayu Gresik mencerminkan praktik pengelolaan yang adaptif, partisipatif, dan akuntabel dalam konteks sekolah berbasis yayasan dengan keterbatasan sumber daya. Integrasi kolaborasi multipihak, pemanfaatan wakaf, dan penguatan digitalisasi berpotensi menjadi kerangka strategis untuk mempercepat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada aspek sarana dan prasarana.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana berbasis data dan partisipatif mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta mendukung pencapaian standar pendidikan di sekolah dengan keterbatasan anggaran (Fadli & Hidayat, 2020); (Earthman, 2017). Selain itu, pemanfaatan sumber pendanaan alternatif dan kolaborasi dengan masyarakat terbukti memperkuat keberlanjutan pengelolaan fasilitas pendidikan (OECD, 2019); (UNESCO, 2021). Dengan demikian, model manajemen sarana dan prasarana kolaboratif berbasis teknologi dan wakaf yang diterapkan di SMAKS Sedayu Gresik memiliki relevansi empiris yang kuat dan berpotensi direplikasi pada sekolah menengah lain dengan karakteristik serupa.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan manajemen sarana dan prasarana di SMAKS Sedayu Gresik telah berjalan relatif efektif sebagai upaya memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023. Dari aspek **perencanaan**, sekolah menerapkan perencanaan yang sistematis, berbasis data inventaris, dan bersifat partisipatif dengan melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, guru, serta komite sekolah. Perencanaan disusun secara realistis dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, namun tetap berorientasi pada prioritas kebutuhan pembelajaran.

Pada aspek **pengadaan**, sekolah menunjukkan praktik yang akuntabel dan fleksibel melalui kombinasi pembelian, hibah, perbaikan, dan pemanfaatan sumber daya lokal, sehingga mampu mengoptimalkan dana terbatas tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi. Dari sisi **capaian standar**, sebagian besar indikator

sarana dan prasarana telah terpenuhi, terutama fasilitas pembelajaran utama, pemeliharaan rutin, rasio siswa per kelas, serta dukungan lingkungan belajar sehat dan pengembangan karakter. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan signifikan pada pemenuhan fasilitas inklusif dan perluasan teknologi digital, yang dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada dukungan eksternal.

Berdasarkan keseluruhan temuan, **model manajemen yang paling tepat** untuk konteks sekolah ini adalah *Manajemen Sarana dan Prasarana Kolaboratif Berbasis Teknologi dan Wakaf dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)*. Model ini relevan dengan karakter sekolah berbasis yayasan dan berpotensi direplikasi pada sekolah swasta dengan sumber daya terbatas.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus lokus tunggal dan pendekatan kualitatif, sehingga generalisasi temuan masih terbatas. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji implementasi model serupa pada berbagai konteks sekolah serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif guna mengukur dampak manajemen sarana prasarana terhadap mutu pembelajaran. Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak SMAKS Sedayu Gresik dan seluruh informan yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z, and D Setiawan. 2021. "Manajemen Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran." *Jurnal Manajiemana Pendidikan* 13(2): 115–26.
- Bafadal, Ibrahim. 2014a. *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori Dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bafadal, Ibrahim. 2014b. *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori Dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bogdan, Robert C, and Sari Knopp Biklen. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Allyn & Bacon.
- Bush, Tony, and Derek Glover. 2016. "School Leadership and Management in Education." *Educational Management Administration & Leadership* 44(4): 611–27. doi:10.1177/1741143214549977.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. ed. 4th ed. SAGE Publications.
- Earthman, Glen I. 2017. "School Facility Conditions and Student Academic Achievement." *Journal of Educational Administration* 55(3): 283–300. doi:10.1108/JEA-09-2015-0078.
- Fadli, M, and R Hidayat. 2020. "Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Pengelolaan Sarana Prasarana." *Jurnal Administrasi Pendidikan* 27(1): 45–58.
- Hidayati, N, and L Rohmah. 2019. "Peran Kepala Sekolah Dalam Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan." *Jurnal Kepemimpinan Pendidikan* 6(2): 89–101.
- Kemendikbudristek. 2023. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan*. Indonesia.
- Kemendikbudristek. 2024a. *Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan Tahun 2023–2024*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbudristek.

- Kemendikbudristek. 2024b. *Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi 8 Standar Nasional Pendidikan Tahun 2023–2024*. Jakarta: Pusdatin Kemendikbudristek.
- Kemendikdasmen. 2025. *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah*.
- Leithwood, Kenneth, Alma Harris, and David Hopkins. 2020. "Seven Strong Claims about Successful School Leadership Revisited." *School Leadership & Management* 40(1): 5–22. doi:10.1080/13632434.2019.1596077.
- Mulyasa, E. 2021. *Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- OECD. 2019. *Education Policy Outlook 2019: Working Together to Help Students Achieve Their Potential*. OECD Publishing.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 2025. *Data Pokok Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas*. Jakarta.
- Sekretariat Negara. 2022. *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Indonesia.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2003. <https://pusmendik.kemdikbud.go.id/pdf/file-154> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta, Indonesia.
- SMA Kanjeng Sepuh. 2025. "Informasi PPDB SMA Kanjeng Sepuh 2024." <https://smakanjengsepuh.sch.id/>.
- Statistik, Badan Pusat. 2024. *Statistik Pendidikan 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E, and K Anwar. 2022. "Pengelolaan Sarana Prasarana Sekolah Berbasis Partisipasi Masyarakat." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 7(3): 201–13.
- Terry, G. R., and L. W. Rue. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- UNESCO. 2021. *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. UNESCO Publishing.
- Wahyosumidjo. 2011. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. ed. 6th ed. SAGE Publications.
- Yogaswara, A, and U S Sa'ud. 2010. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA